SIARAN PERS

(Press Release)

SIARAN PERS
NOMOR: 7240/SP-HMS/11/2026
(Hari HAM Sedunia)

23 November 2026

Pemprov DKI dan Komnas HAM Perkuat Pembangunan Berbasis HAM Menuju Kota Global

JAKARTA PUSAT - Jakarta — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memperkuat kolaborasi untuk memastikan pembangunan Jakarta menuju kota global tetap menjamin hak masyarakat atas ruang hidup yang aman, layak, dan berkelanjutan. Kerja sama tersebut mencakup penguatan kebijakan pembangunan, perluasan layanan publik yang inklusif, serta edukasi HAM hingga tingkat masyarakat.

Komitmen itu disampaikan Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, dalam media briefing menjelang peringatan Hari HAM Sedunia ke-78 di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/11).

Sigit menjelaskan, transformasi Jakarta menuju kota global sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 harus berjalan seiring dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Hal tersebut semakin relevan menjelang peringatan 500 tahun Jakarta pada 22 Juni 2027.

Menurutnya, kolaborasi dengan Komnas HAM menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah memperhatikan hak seluruh warga.

“Kami melihat bahwa Komnas HAM sebagai sebuah lembaga independen akan bisa memberikan masukan yang strategis bagi kami dalam melaksanakan penyusunan kebijakan maupun implementasi pembangunan di DKI Jakarta,” ujar Sigit.

Selain penguatan kebijakan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memperluas akses layanan publik dan partisipasi masyarakat secara setara, termasuk bagi kelompok rentan. Edukasi serta pembudayaan nilai HAM juga akan diperkuat hingga tingkat masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov DKI Jakarta melibatkan 10 perangkat daerah dalam persiapan peringatan Hari HAM Sedunia ke-78. Keterlibatan tersebut mencakup sektor pendidikan, perhubungan, pemerintahan,

serta wilayah kota dan kabupaten administrasi.

Puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke-78 dijadwalkan berlangsung pada 10 Desember 2026 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, dengan tema Pembangunan yang Menjamin Ruang Hidup yang Aman, Layak, dan Berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan pembangunan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia.

“Pembangunan harus dijadikan sebagai satu instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan, bukan sebaliknya menciptakan ketimpangan, mempersempit ruang hidup, atau mengorbankan hak-hak masyarakat atas nama pertumbuhan dan kemajuan,” tegas Anis.

Menurutnya, pembangunan berbasis HAM perlu memperhatikan tiga aspek utama, yakni penanganan ketimpangan dan ancaman terhadap ruang hidup, pemajuan HAM melalui kebijakan pembangunan, serta penguatan partisipasi publik.

Anis menilai Jakarta memiliki posisi strategis untuk menerapkan pendekatan tersebut, sekaligus menjadi rujukan bagi daerah lain. Praktik pelayanan publik yang memperhatikan kelompok rentan, termasuk transportasi publik dan penyediaan rumah aman, menjadi bagian dari upaya yang perlu terus dikembangkan.

“Jakarta selama ini menjadi barometer pembangunan nasional. Jakarta memiliki posisi yang sangat strategis untuk mengimplementasikan pembangunan berbasis asasi manusia secara faktual sekaligus juga menjadi rujukan bagi daerah lain di Indonesia,” pungkasnya.

Dinas Kominfotik Pemprov DKI Jakarta
Website : https://www.jakarta.go.id/pusat-media
Twitter : @DKIJakarta
Facebook : Pemprov DKI Jakarta
Instagram : @DKIJakarta